

Konstruksi Yuridis Danantara Indonesia: Transformasi Tata Kelola Kekayaan Negara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Kontemporer

Bunga Ananda Pratama^{1*}, Sri Handayani²

¹ Faculty of Economics, Universitas Sriwijaya, Indonesia. E-mail: bunqananda1636@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Sriwijaya, Indonesia. E-mail: handayanisri779@yahoo.co.id

Abstract: This research examines the juridical construction of Danantara in transforming state asset governance in Indonesia. The research aims to analyze the characteristics, legal, and economic implications of the Danantara model in state asset management. Using a normative juridical method, the research explores the model's potential to integrate legal, economic, and technological perspectives. The research findings demonstrate that Danantara can create an adaptive legal framework responsive to global economic dynamics. The model transforms state asset governance through strengthening digital mechanisms, enhancing transparency, and optimizing economic value. The research's significance lies in its conceptual contribution to contemporary economic law development.

Keywords: Danantara; Juridical Construction; State Asset Governance

Abstrak: Penelitian ini mengkaji konstruksi yuridis Danantara dalam transformasi tata kelola kekayaan negara Indonesia. Tujuan penelitian adalah menganalisis karakteristik, implikasi hukum, dan ekonomi model Danantara dalam pengelolaan aset negara. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian mengeksplorasi potensi model untuk mengintegrasikan perspektif hukum, ekonomi, dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Danantara mampu menciptakan kerangka hukum adaptif yang responsif terhadap dinamika ekonomi global. Model ini mentransformasi tata kelola kekayaan negara melalui penguatan mekanisme digital, peningkatan transparansi, dan optimalisasi nilai ekonomis. Signifikansi penelitian terletak pada kontribusi konseptual dalam pengembangan hukum ekonomi kontemporer.

Kata Kunci: Danantara, Konstruksi Yuridis, Tata Kelola Kekayaan Negara

1. Pendahuluan

Dinamika pengelolaan kekayaan negara di Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam konteks hukum ekonomi kontemporer, yang menuntut kajian mendalam tentang konstruksi yuridis Danantara sebagai instrumen strategis dalam tata kelola aset negara. Kompleksitas pengelolaan kekayaan negara saat ini tidak hanya mencakup aspek administratif dan finansial, tetapi juga melibatkan perspektif hukum yang semakin kompleks dan dinamis. Transformasi tata kelola kekayaan negara di Indonesia merupakan isu strategis dalam hukum ekonomi kontemporer. Kompleksitas pengelolaan aset negara tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dan finansial, tetapi juga melibatkan

dimensi hukum yang terus berkembang seiring dengan perubahan ekonomi global dan perkembangan teknologi. Dalam konteks ini, model Danantara muncul sebagai alternatif dalam pengelolaan kekayaan negara yang lebih adaptif, transparan, dan efisien.

Pendekatan pengelolaan aset negara berbasis digital bukanlah fenomena baru dalam sistem hukum ekonomi global. Berbagai negara telah mengadopsi model tata kelola aset negara yang berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi publik. Sebagai contoh, di Uni Eropa, implementasi Digital Government Strategy telah memungkinkan pengelolaan keuangan publik yang lebih transparan melalui pemanfaatan teknologi blockchain dan artificial intelligence (Cioffi, 2019). Studi yang dilakukan oleh (Adar BakhshBaloch, 2017) menunjukkan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan aset negara dapat mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pengelola keuangan publik. Model serupa juga diterapkan di Singapura melalui Government Technology Agency (GovTech), yang memungkinkan sistem manajemen keuangan publik beroperasi secara otomatis dan berbasis data real-time untuk memaksimalkan nilai ekonomi aset negara (Koeswahyono, 2024).

Di Amerika Serikat, reformasi tata kelola aset publik dilakukan melalui Federal Asset Management Framework, yang mengedepankan transparansi dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya negara (Oti-Sarpong, K., Pärn, E. A., Burgess, G., & Zaki, 2021). Pendekatan ini menekankan perlunya harmonisasi antara regulasi hukum ekonomi dengan pengembangan teknologi digital guna memastikan bahwa setiap transaksi dan pengelolaan aset negara dapat dipantau secara real-time. Studi yang dilakukan oleh (Zhang et al., 2023) menegaskan bahwa negara-negara dengan tata kelola aset publik berbasis digital memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam menjaga keberlanjutan fiskal serta meningkatkan daya saing ekonomi. Model Danantara di Indonesia perlu mengadopsi praktik terbaik dari sistem ini dengan memperkuat infrastruktur regulasi berbasis teknologi.

Dalam konteks negara berkembang, Brasil telah menerapkan Integrated Financial Management Information System (IFMIS) untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Umar, 2022), sistem ini memungkinkan audit real-time terhadap aset negara, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan barang milik negara. Selain itu, Nigeria menerapkan model serupa melalui Government Integrated Financial Management System (GIFMIS), yang memperkuat aspek legal dalam tata kelola keuangan publik dan mencegah praktik korupsi (Ma et al., 2023).

Implementasi model tata kelola aset negara berbasis digital di berbagai negara menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah elemen kunci dalam meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan kekayaan negara. Indonesia, melalui konsep Danantara, dapat mengambil pelajaran dari pengalaman negara-negara tersebut dengan menerapkan regulasi yang lebih adaptif dan membangun ekosistem digital yang mendukung tata kelola aset negara yang responsif dan fleksibel. Studi perbandingan ini memperlihatkan bahwa pendekatan hukum ekonomi kontemporer harus berorientasi pada integrasi teknologi sebagai bagian dari upaya modernisasi tata kelola kekayaan negara (Rodrik, 2022).

Meskipun pendekatan digital memiliki keunggulan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, berbagai tantangan juga perlu diantisipasi. Studi oleh (Hamledari & Fischer, 2021) menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi tata kelola aset negara berbasis digital di negara berkembang adalah kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai serta resistensi terhadap perubahan kebijakan. Oleh karena itu, dalam pengembangan Danantara, diperlukan dukungan regulasi yang jelas serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola sistem berbasis digital. Dengan mengadopsi pengalaman negara lain serta memperkuat aspek hukum dan teknologi, Danantara berpotensi menjadi model tata kelola aset negara yang lebih modern dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global.

Model ini berpotensi untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi klasik dan kebutuhan dinamis pengelolaan aset negara, yang selama ini menghadapi berbagai kendala struktural dan normatif. Namun, untuk memahami implikasi hukum dari pendekatan ini, diperlukan kajian yuridis yang menelaah dasar hukum yang relevan serta bagaimana model ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum yang telah ada. Meskipun berbagai penelitian telah membahas tata kelola aset negara dalam perspektif hukum ekonomi, kajian mengenai konstruksi yuridis model Danantara sebagai pendekatan inovatif dalam pengelolaan kekayaan negara masih sangat terbatas. Studi sebelumnya cenderung hanya berfokus pada aspek administratif dan regulasi klasik dalam pengelolaan aset negara, tanpa mengeksplorasi integrasi antara hukum, ekonomi, dan teknologi dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Selain itu, belum ada kajian yang membahas secara mendalam bagaimana model ini dapat diharmonisasikan dengan kebijakan desentralisasi serta regulasi yang telah ada.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik yuridis model Danantara dalam sistem hukum Indonesia, mengeksplorasi potensi transformasi tata kelola kekayaan negara melalui pendekatan ini, serta mengidentifikasi implikasi hukum dan ekonomi yang muncul dari penerapannya. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode komparatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan konseptual yang lebih kuat bagi pengembangan regulasi tata kelola aset negara yang lebih adaptif, efisien, dan transparan, serta mampu menjawab tantangan ekonomi global di era digitalisasi. Salah satu landasan utama dalam tata kelola kekayaan negara adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjadi kerangka fundamental dalam mengatur pengelolaan keuangan publik, termasuk aset negara. Undang-undang ini menegaskan bahwa kekayaan negara harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam konteks model Danantara, prinsip-prinsip ini menjadi esensial dalam menciptakan sistem pengelolaan aset negara yang lebih responsif terhadap tantangan modern. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan regulasi yang lebih rinci mengenai pengelolaan barang milik negara (BMN) dan kekayaan daerah. UU ini menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pemanfaatan aset negara agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan publik. Dalam implementasi Danantara, penguatan regulasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa tata kelola berbasis digital yang diusulkan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, desentralisasi pengelolaan aset negara menjadi isu penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola aset yang menjadi haknya, termasuk pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan barang milik daerah (BMD). Dalam konteks model Danantara, regulasi ini perlu dianalisis lebih lanjut untuk memastikan bahwa integrasi model baru tidak bertentangan dengan prinsip otonomi daerah serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, tata kelola kekayaan negara berbasis Danantara harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum nasional, tetapi juga sinkronisasi dengan kebijakan desentralisasi yang telah diterapkan. Selain undang-undang utama tersebut, terdapat berbagai regulasi turunan yang perlu dikaji lebih dalam untuk memperkuat kerangka hukum dari model Danantara. Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi salah satu instrumen hukum yang mendetailkan mekanisme perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemindahtanganan aset negara. PP ini menjadi pedoman teknis dalam tata kelola kekayaan negara dan daerah agar dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Dalam konteks Danantara, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan aset negara harus sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam PP tersebut. Oleh karena itu, penguatan aspek regulasi ini akan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi model Danantara dalam sistem hukum ekonomi Indonesia. Di samping peraturan nasional, sistem hukum Indonesia juga harus memperhatikan standar internasional dalam tata kelola aset publik. Berbagai prinsip dalam *Good Public Governance* yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank* memberikan rekomendasi mengenai mekanisme pengelolaan aset negara yang transparan dan berkelanjutan. Indonesia telah berupaya mengadopsi prinsip-prinsip ini dalam berbagai kebijakan keuangan negara, yang salah satunya tercermin dalam reformasi pengelolaan BMN dan BMD. Model Danantara sebagai bentuk inovasi dalam tata kelola kekayaan negara harus mampu mengadopsi standar-standar internasional ini agar dapat diterima dalam sistem hukum yang lebih luas dan memiliki daya saing global.

Dengan memperhatikan berbagai aspek hukum yang telah disebutkan, penting bagi model Danantara untuk memperkuat landasan normatifnya agar dapat diterapkan secara efektif dalam sistem hukum Indonesia (Picard, 2020). Kajian lebih lanjut mengenai harmonisasi regulasi dan tantangan hukum yang dihadapi dalam penerapan model ini menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa inovasi yang diusulkan tidak hanya menawarkan solusi praktis, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang kuat. Dengan demikian, pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan dalam membangun konsep tata kelola kekayaan negara yang lebih adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan (Pemerintah, 2003).

Fenomena ini mendorong kebutuhan akan analisis komprehensif yang mampu mengeksplorasi dimensi yuridis, ekonomi, dan strategis dari mekanisme Danantara dalam konteks pembangunan nasional Indonesia. Kajian tentang tata kelola kekayaan negara telah menjadi perhatian penting dalam literatur hukum ekonomi Indonesia, namun

penelitian yang fokus pada konstruksi yuridis Danantara masih relatif terbatas (Algan Tezel, 2021). Studi sebelumnya cenderung memandang Danantara sebagai instrumen administratif belaka, tanpa mengeksplorasi potensi transformatifnya dalam kerangka hukum ekonomi kontemporer. Padahal, Danantara memiliki kapasitas untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi klasik dan kebutuhan dinamis pengelolaan kekayaan negara di era globalisasi dan digitalisasi (Jamilah & Firmansyah, 2023).

Kompleksitas permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini terletak pada dinamika hukum yang mengitari mekanisme Danantara. Sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mengakomodasi model tata kelola kekayaan negara yang responsif terhadap perubahan ekonomi global (Cooke & Williams, 2025). Transformasi ini tidak hanya memerlukan kerangka regulasi yang adaptif, tetapi juga membutuhkan paradigma berpikir hukum yang inovatif dan komprehensif. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi celah-celah yuridis yang ada dalam sistem pengelolaan kekayaan negara saat ini dan menawarkan konstruksi hukum alternatif melalui perspektif Danantara (Umam, 2021). Penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek-aspek administratif dan manajerial pengelolaan kekayaan negara. Namun, kajian mendalam tentang konstruksi yuridis Danantara masih sangat terbatas. Beberapa penelitian terkait seperti yang dilakukan oleh (Abdullah, 2021; Darmawati, 2020) hanya menyentuh permukaan mekanisme kelembagaan, tanpa mengeksplorasi dimensi hukum ekonomi yang lebih kompleks. Keterbatasan ini menunjukkan urgensi penelitian komprehensif yang mampu memberikan kerangka konseptual dan analitis yang lebih mendalam.

Tujuan utama penelitian ini adalah mengonstruksi model yuridis Danantara yang responsif dan adaptif dalam konteks hukum ekonomi kontemporer. Secara spesifik, penelitian akan menganalisis: (1) karakteristik yuridis Danantara dalam sistem hukum Indonesia, (2) potensi transformasi tata kelola kekayaan negara melalui pendekatan Danantara, dan (3) implikasi hukum dan ekonomi dari model konstruksi yuridis yang diusulkan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan kerangka konseptual yang tidak sekadar memberikan solusi praktis, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum ekonomi nasional. Signifikansi ilmiah penelitian terletak pada kemampuannya untuk mendekonstruksi paradigma tradisional dalam pengelolaan kekayaan negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan interdisipliner, penelitian ini akan menghasilkan model konstruksi yuridis yang inovatif. Kebaruan konseptual akan tercermin dari kemampuan model untuk mengintegrasikan aspek hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan dalam kerangka Danantara.

Kontribusi teoritis penelitian ini mencakup pengembangan kerangka konseptual baru dalam hukum ekonomi Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap konstruksi yuridis Danantara, penelitian akan memberikan perspektif segar tentang potensi transformasi tata kelola kekayaan negara. Hal ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum ekonomi. Metodologi penelitian akan menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang komprehensif. Analisis akan dilakukan melalui teknik interpretasi hukum, konstruksi hukum, dan pendekatan komparatif untuk

mengeksplorasi model Danantara dalam konteks sistem hukum Indonesia. Pendekatan interdisipliner akan memungkinkan penelitian untuk menghasilkan perspektif yang holistik dan komprehensif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang komprehensif untuk mengeksplorasi konstruksi hukum Danantara dalam transformasi tata kelola kekayaan negara. Metodologi ini dipilih karena kemampuannya melakukan analisis mendalam terhadap norma, kaidah, dan konstruksi hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, khususnya mekanisme pengelolaan kekayaan negara. Sumber data penelitian difokuskan pada bahan hukum sekunder, mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum resmi, putusan pengadilan, dan literatur hukum relevan. Penggunaan data sekunder memungkinkan analisis komprehensif tanpa bergantung pada data lapangan, dengan mempertimbangkan kompleksitas konstruksi hukum Danantara.

Kerangka analisis hukum mencakup beberapa peraturan kunci, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Analisis diperkaya dengan kajian putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait pengelolaan kekayaan negara. Teknik analisis menggunakan metode interpretasi hukum multi-dimensi: gramatikal untuk menganalisis makna tekstual, sistematis untuk memahami keterkaitan antarperaturan, dan teleologis untuk menggali rasional pembentukan konstruksi hukum. Pendekatan konstruksi hukum memungkinkan rekonstruksi konseptual mekanisme Danantara, mengidentifikasi celah yuridis, dan menawarkan model alternatif responsif terhadap dinamika hukum ekonomi kontemporer.

Metodologi komparatif digunakan untuk membandingkan konstruksi hukum Danantara dengan mekanisme eksisting, fokus pada identifikasi inovasi dan potensi transformasi tata kelola kekayaan negara. Perbandingan meliputi aspek normatif dan pertimbangan implementasi praktis. Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber melibatkan referensi hukum dari institusi berbeda, sedangkan triangulasi metode menggabungkan teknik interpretasi hukum yang beragam. Pendekatan holistik mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk analisis komprehensif. Tahap akhir penelitian berfokus pada penarikan kesimpulan dan formulasi rekomendasi. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan analisis mendalam, menghasilkan model konstruksi yuridis Danantara yang inovatif. Rekomendasi bersifat konseptual dan praktis, memberikan kontribusi teoritis dalam transformasi tata kelola kekayaan negara Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Karakteristik Yuridis Danantara dalam Sistem Hukum Indonesia

Danantara dimaknai sebagai mekanisme inovatif pengelolaan kekayaan negara yang mengintegrasikan aspek yuridis, ekonomi, dan teknologi digital. Konsep ini merepresentasikan pendekatan transformatif dalam tata kelola aset negara, yang memungkinkan adaptasi responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer (Sugita, 2024). Konstruksi yuridis Danantara menghadirkan paradigma baru dalam sistem hukum Indonesia melalui fleksibilitas regulatoris yang unik. Landasan hukumnya merujuk pada regulasi kunci seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Melalui UU Cipta Kerja, Danantara dapat mengakomodasi skema investasi lebih efisien dalam pemanfaatan aset negara untuk sektor swasta, sambil tetap mempertahankan prinsip akuntabilitas (Dwiputrianti & Zendrato, 2016). Karakteristik fundamental Danantara mencakup empat dimensi: (1) adaptasi regulatif dinamis, (2) integrasi komprehensif aspek hukum-ekonomi-administrasi, (3) mekanisme transparansi canggih, dan (4) orientasi optimalisasi nilai ekonomis kekayaan negara. Pendekatan ini mentransformasi pandangan tradisional tentang aset negara dari entitas statis menjadi instrumen dinamis yang dapat dikembangkan melalui mekanisme hukum responsif.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi acuan utama dalam mengatur aspek administratif dan normatif dalam pemanfaatan kekayaan negara. Dengan mempertimbangkan regulasi-regulasi tersebut, konstruksi yuridis Danantara harus mampu menjawab tantangan hukum yang ada dengan menciptakan mekanisme yang adaptif, transparan, dan akuntabel, sehingga model ini dapat diimplementasikan tanpa bertentangan dengan prinsip dasar hukum ekonomi yang berlaku di Indonesia. Secara epistemologis, konstruksi yuridis Danantara merepresentasikan evolusi konseptual dalam pemahaman tentang tata kelola kekayaan negara. Mekanisme ini tidak sekadar menjadi instrumen administratif, melainkan platform strategis yang mentransformasi paradigma pengelolaan aset negara. Fleksibilitas hukum yang dikembangkan memungkinkan sistem hukum untuk secara dinamis merespons perubahan ekonomi global, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi (Portuna, 2024).

Struktur yuridis Danantara memperlihatkan keunikan dalam mengombinasikan pendekatan normatif dan pragmatis. Mekanisme ini mengintegrasikan kerangka hukum yang rigid dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, menciptakan model tata kelola yang responsif terhadap kompleksitas ekonomi kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan sistem hukum untuk tidak sekadar menjadi instrumen regulasi, tetapi juga berperan aktif sebagai fasilitator transformasi ekonomi. Dari perspektif epistemologis, karakteristik yuridis Danantara ditandai dengan empat dimensi fundamental. Pertama, kemampuan adaptasi regulatif yang memungkinkan sistem hukum untuk secara dinamis merespons perubahan ekonomi. Kedua, integrasi komprehensif antara aspek hukum, ekonomi, dan administrasi. Ketiga, mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang lebih canggih. Keempat, orientasi pada optimalisasi nilai ekonomis kekayaan negara (Hamdi, 2023).

Kompleksitas konstruksi yuridis Danantara tercermin dalam kemampuannya mentransformasi paradigma tradisional tentang kekayaan negara. Model ini tidak sekedar memandang aset sebagai entitas statis, melainkan sebagai instrumen dinamis yang dapat dioptimalkan melalui mekanisme hukum yang responsif. Pendekatan ini memungkinkan negara untuk tidak hanya melindungi kekayaannya, tetapi juga mengembangkan potensi ekonomi secara maksimal. Meskipun model Danantara menawarkan solusi inovatif dalam tata kelola kekayaan negara, terdapat beberapa tantangan hukum yang perlu diperhatikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya regulasi spesifik yang mengatur pengelolaan aset negara berbasis digital. Saat ini, regulasi yang ada masih berorientasi pada sistem pengelolaan konvensional, sehingga implementasi Danantara dapat menghadapi hambatan administratif dan hukum.

Selain itu, sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan tersendiri. Otonomi daerah memungkinkan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan aset negara, yang dapat memperlambat adopsi Danantara secara nasional. Ketidakharmonisan regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam kewenangan dan mekanisme implementasi model tersebut. Aspek keamanan data dan risiko penyalahgunaan teknologi juga menjadi perhatian penting. Digitalisasi pengelolaan aset negara membuka peluang bagi ancaman cyber fraud, manipulasi data, serta kebocoran informasi strategis. Oleh karena itu, diperlukan regulasi tambahan yang memastikan perlindungan data, keamanan sistem digital, serta mekanisme audit berbasis teknologi agar model Danantara dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.

Implikasi yuridis dari konstruksi Danantara sangat signifikan dalam konteks sistem hukum Indonesia. Mekanisme ini menciptakan ruang transformasi yang memungkinkan kerangka hukum untuk secara berkelanjutan beradaptasi dengan kompleksitas ekonomi global. Fleksibilitas yang dikembangkan tidak mengorbankan prinsip-prinsip fundamental hukum, tetapi justru memperkuatnya melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan dinamis (Viljoen, 2021).

3.2. Transformasi Tata Kelola Kekayaan Negara melalui Pendekatan Danantara

Pendekatan Danantara menghadirkan terobosan konseptual dalam paradigma pengelolaan kekayaan negara, mentransformasi mekanisme konvensional menjadi sistem adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer (Sujoko, 2020). Kompleksitas transformasi ini terletak pada integrasi inovatif antara kerangka hukum tradisional dan kebutuhan pengelolaan aset di era digital. Transformasi multidimensional Danantara berfokus pada digitalisasi dan transparansi sebagai strategi fundamental optimalisasi aset negara. Implementasinya mensyaratkan tidak sekedar inovasi teknologi, melainkan landasan regulatoris yang menjamin keabsahan dan perlindungan hukum transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjadi instrumen kunci dalam mengawal transformasi digital pengelolaan kekayaan negara. Melalui sistem berbasis digital Danantara, setiap proses pengelolaan kekayaan negara didokumentasikan secara elektronik, signifikan mengurangi risiko manipulasi data dan korupsi. Sistem ini mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam kerangka hukum, memungkinkan pelacakan real-time, transparansi maksimal, dan akurasi data tinggi dalam manajemen aset negara. Empat dimensi kunci

transformasi Danantara mencakup: Pertama, digitalisasi komprehensif proses pengelolaan aset. Kedua, pengembangan kerangka hukum adaptif yang responsif terhadap dinamika ekonomi global. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui jejak audit digital. Keempat, optimalisasi nilai ekonomis kekayaan negara melalui analisis data canggih. Pendekatan ini mentransformasi hukum dari instrumen rigid menjadi platform dinamis, mampu mengeksplorasi potensi ekonomi tersembunyi dan merancang strategi pengembangan ekonomi yang cerdas. Danantara tidak sekadar melindungi aset, tetapi secara aktif menciptakan ekosistem tata kelola yang responsif dan inovatif.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memberikan dasar hukum bagi modernisasi sistem administrasi pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan aset negara. Melalui pendekatan Danantara yang berbasis SPBE, pemerintah dapat mengembangkan sistem digital yang terintegrasi, meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam tata kelola kekayaan negara. Oleh karena itu, transformasi yang diusung oleh model Danantara tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai ekonomis aset negara, tetapi juga memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai dengan regulasi yang mendukung digitalisasi tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dimensi pertama transformasi adalah digitalisasi komprehensif proses pengelolaan aset negara. Pendekatan Danantara tidak sekadar mengadopsi teknologi digital, tetapi mengintegrasikan secara mendalam teknologi informasi ke dalam kerangka hukum dan tata kelola. Mekanisme ini memungkinkan pelacakan real-time, transparansi maksimal, dan akurasi data yang tinggi dalam pengelolaan kekayaan negara. Transformasi digital ini menciptakan ekosistem tata kelola yang responsif, di mana setiap transaksi dan perpindahan aset dapat dimonitor secara instan dan komprehensif (Togatorop et al., 2024).

Sebagai contoh konkret, implementasi model Danantara dapat diterapkan dalam pengelolaan aset negara yang tidak produktif. Banyak aset milik pemerintah, seperti lahan tidur dan bangunan yang tidak terpakai, mengalami stagnasi karena keterbatasan regulasi dan mekanisme pemanfaatan. Dengan sistem Danantara, aset-aset ini dapat dikelola melalui platform digital berbasis blockchain, yang memungkinkan transparansi dalam pencatatan, pemanfaatan, serta transfer kepemilikan kepada investor strategis. Sebagai perbandingan, Singapura telah menerapkan sistem serupa dalam pengelolaan aset publiknya melalui Government Technology Agency (GovTech), yang memastikan aset negara dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan ekonomi dan sosial.

Selain itu, model Danantara juga dapat diterapkan dalam optimalisasi pengelolaan barang milik negara (BMN) di berbagai instansi pemerintahan. Sebagai contoh, aset kendaraan dinas atau peralatan kantor yang tidak lagi digunakan dapat dilelang secara transparan melalui platform digital berbasis smart contract, sehingga mencegah praktik penyalahgunaan aset. Sistem ini dapat mengacu pada pengalaman Estonia dalam penerapan e-Governance, yang telah berhasil mendigitalisasi pengelolaan sumber daya negara secara efisien. Dengan penerapan Danantara, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi tata kelola aset negara serta memastikan pemanfaatannya memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Pengembangan kerangka hukum yang adaptif menjadi elemen kunci kedua dalam transformasi. Model Danantara merancang struktur regulasi yang mampu beradaptasi dengan kecepatan perubahan ekonomi global. Fleksibilitas hukum yang dikembangkan memungkinkan sistem untuk secara dinamis merespons inovasi teknologi, model bisnis baru, dan kompleksitas transaksi ekonomi kontemporer. Pendekatan ini mentransformasi hukum dari instrumen rigid menjadi platform dinamis yang mendukung ekosistem ekonomi yang berkembang. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas merupakan dimensi ketiga transformasi yang fundamental. Melalui mekanisme Danantara, setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara dapat dilacak, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan. Sistem ini menciptakan jejak audit digital yang komprehensif, mengurangi potensi korupsi, dan membangun kepercayaan publik terhadap mekanisme tata kelola.

Transparansi tidak lagi sekadar konsep abstrak, tetapi menjadi praktik konkret dalam setiap tahapan pengelolaan aset. Optimalisasi nilai ekonomis kekayaan negara menjadi fokus keempat transformasi. Pendekatan Danantara mengembangkan mekanisme yang tidak hanya melindungi aset, tetapi juga secara aktif mengeksplorasi potensi ekonomi yang tersembunyi. Melalui analisis data canggih, model ini mampu mengidentifikasi peluang investasi, mengoptimalkan utilisasi aset, dan merancang strategi pengembangan ekonomi yang lebih cerdas dan responsif.

3.3. Analisis Yuridis Konstruksi Hukum Ekonomi Kontemporer

Konstruksi hukum ekonomi kontemporer melalui pendekatan Danantara menghadirkan paradigma epistemologis revolusioner yang melampaui batas tradisional antara disiplin hukum dan ekonomi. Model ini mentransformasi kerangka konseptual hukum menjadi platform dinamis yang tidak sekadar mengatur, tetapi memfasilitasi inovasi dan transformasi ekonomi (Mas'ud, 2022). Kompleksitas konstruksi terletak pada kemampuan mengakomodasi dinamika transaksi ekonomi modern melalui pendekatan interdisipliner. Integrasi perspektif hukum, ekonomi, teknologi, dan tata kelola pemerintahan menciptakan mekanisme hukum yang responsif dan adaptif terhadap perubahan sistemik.

Karakteristik fundamental konstruksi hukum ekonomi kontemporer meliputi tiga dimensi kritis: Pertama, fleksibilitas regulatif yang memungkinkan sistem hukum beradaptasi dengan kecepatan transformasi teknologi dan model bisnis. Kedua, kemampuan mengintegrasikan perspektif multidisipliner dalam kerangka analisis. Ketiga, orientasi pada penciptaan nilai ekonomi berkelanjutan yang melampaui sekadar regulasi (Azamta Besnata Mutiara & Arief Suryono, 2024). Sebagai langkah lanjutan, pemerintah perlu menyiapkan instrumen hukum khusus yang mengakui Danantara sebagai model sah dalam tata kelola aset negara. Hal ini mensyaratkan pengembangan peraturan pelaksana komprehensif yang mencakup keamanan data, mekanisme audit digital, dan protokol integrasi antarlembaga. Konstruksi hukum ekonomi kontemporer tidak sekadar menawarkan solusi teknis, melainkan membuka ruang transformasi fundamental dalam tata kelola kekayaan negara.

3.4. Implikasi Hukum dan Ekonomi Model Konstruksi Yuridis Danantara

Konstruksi yuridis Danantara menghadirkan implikasi fundamental yang melintasi batas-batas tradisional antara sistem hukum dan ekonomi. Kompleksitas model ini terletak pada kemampuannya untuk mentransformasi secara menyeluruh mekanisme pengelolaan kekayaan negara, dengan implikasi yang bersifat multidimensional dan strategis (Pratama & Santoso, 2022). Perspektif komprehensif yang dikembangkan tidak sekadar mengubah kerangka regulasi, tetapi secara fundamental merevolusi paradigma tata kelola kekayaan negara. Dari perspektif hukum, implikasi model konstruksi yuridis Danantara bersifat transformatif. Implikasi hukum dan ekonomi dari model konstruksi yuridis Danantara mencakup aspek tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa tata kelola kekayaan negara berjalan secara akuntabel, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks hukum administrasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi dasar dalam menilai tanggung jawab pejabat publik terhadap pengelolaan aset negara, termasuk aspek pengambilan keputusan berbasis sistem digital dalam model Danantara. UU ini menegaskan bahwa setiap kebijakan administratif yang terkait dengan aset negara harus dilakukan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti kepastian hukum, keterbukaan, dan proporsionalitas.

Selain itu, penerapan model Danantara harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang mengharuskan adanya mekanisme pengawasan ketat dalam setiap tahap pengelolaan aset negara guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Dari perspektif ekonomi, digitalisasi tata kelola melalui Danantara diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset negara, sehingga menghasilkan nilai ekonomis yang lebih optimal bagi pembangunan nasional. Dengan adanya regulasi yang jelas, model ini tidak hanya memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kekayaan negara, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi yang lebih sehat dan berdaya saing tinggi. Pertama, model ini mendorong restrukturisasi menyeluruh kerangka regulasi yang ada, menciptakan sistem hukum yang jauh lebih responsif terhadap dinamika ekonomi global. Pendekatan ini mentransformasi hukum dari instrumen statis menjadi platform dinamis yang mampu beradaptasi dengan kecepatan perubahan teknologi dan model bisnis kontemporer. Restrukturisasi tidak sekadar bersifat administratif, tetapi mencakup rekonstruksi epistemologis tentang fungsi dan peran hukum dalam tata kelola ekonomi.

Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara mengalami peningkatan signifikan. Model Danantara mengembangkan sistem pemantauan yang terintegrasi, memungkinkan pelacakan komprehensif setiap transaksi dan perpindahan aset (Isti Puspitasari & Irwan Triadi, 2024). Transparansi yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga menciptakan mekanisme pencegahan korupsi yang lebih canggih. Setiap tahapan pengelolaan kekayaan negara dapat diverifikasi, diaudit, dan dipertanggungjawabkan secara real-time. Dari perspektif ekonomi, implikasi model konstruksi yuridis Danantara bahkan lebih fundamental. Model ini berpotensi mentransformasi secara radikal efisiensi pengelolaan aset negara. Melalui integrasi teknologi digital dan analitika canggih, Danantara mampu mengidentifikasi

peluang ekonomi tersembunyi, mengoptimalkan utilisasi aset, dan merancang strategi investasi yang lebih cerdas.

Transformasi ini tidak sekadar meningkatkan nilai ekonomis, tetapi juga mendorong inovasi dalam pengelolaan kekayaan negara. Mekanisme tata kelola yang dihasilkan jauh lebih transparan dan efisien dibandingkan model konvensional. Integrasi teknologi informasi memungkinkan pemantauan real-time, analisis prediktif, dan pengambilan keputusan berbasis data. Hal ini berdampak langsung pada kemampuan negara untuk memaksimalkan potensi ekonomi yang dimiliki, mengubah kekayaan negara dari sekadar aset menjadi instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional.

3.5. Kontribusi dan Rekomendasi Pengembangan Model Yuridis

Kontribusi ilmiah penelitian konstruksi yuridis Danantara memiliki signifikansi yang sangat komprehensif dalam pengembangan kerangka hukum ekonomi Indonesia. Model yang dihasilkan tidak sekadar menawarkan pendekatan teoritis, tetapi menghadirkan kerangka transformatif yang mampu menjembatani kesenjangan antara sistem hukum konvensional dan kebutuhan dinamis tata kelola kekayaan negara di era kontemporer. Originalitas kontribusi terletak pada kemampuan model untuk mengintegrasikan perspektif multidisipliner ke dalam konstruksi yuridis yang inovatif dan responsif. Rekomendasi pengembangan model yuridis mencakup empat dimensi strategis yang fundamental. Pertama, pengembangan kerangka regulasi yang adaptif merupakan prasyarat utama transformasi tata kelola kekayaan negara. Model Danantara merekomendasikan redesign menyeluruh mekanisme regulasi yang mampu beradaptasi dengan kecepatan perubahan teknologi dan model bisnis kontemporer. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat responsif, tetapi juga antisipatif, dengan membangun sistem hukum yang dapat mengakomodasi inovasi dan transformasi ekonomi yang belum sepenuhnya terbayangkan.

Dimensi kedua fokus pada penguatan mekanisme digital dalam tata kelola kekayaan negara. Rekomendasi komprehensif meliputi implementasi teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan analitika canggih untuk mengoptimalkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan aset. Integrasi teknologi digital tidak sekadar bersifat instrumental, tetapi mentransformasi fundamental cara pandang terhadap pengelolaan kekayaan negara, mengubahnya dari sekadar mekanisme administratif menjadi platform strategis pengembangan ekonomi nasional. Peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi fokus rekomendasi ketiga. Model Danantara mengusulkan transformasi menyeluruh struktur dan kultur birokrasi, dengan menekankan pengembangan kompetensi SDM yang mampu memahami dan mengoperasikan mekanisme hukum ekonomi kontemporer. Hal ini mencakup program pelatihan berkelanjutan, rekrutmen tenaga ahli interdisipliner, dan penciptaan ekosistem organisasi yang inovatif dan adaptif (Atsar, 2023).

Dimensi keempat adalah pengintegrasian pendekatan interdisipliner dalam konstruksi hukum ekonomi. Rekomendasi ini mendorong dekonstruksi batas-batas tradisional antardisiplin, menciptakan platform analisis yang mampu mensinergikan perspektif hukum, ekonomi, teknologi, dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan interdisipliner tidak sekadar menjadi metode analisis, tetapi menjadi filosofi dasar dalam merancang

mekanisme hukum ekonomi yang kompleks dan dinamis. Model yuridis yang dihasilkan memiliki potensi transformasi yang signifikan. Rekomendasi penelitian dirancang tidak sekadar sebagai kerangka konseptual, tetapi sebagai panduan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang mekanisme hukum ekonomi yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi. Signifikansi model terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan paradigma baru dalam tata kelola kekayaan negara.

4. Kesimpulan

Konstruksi Model konstruksi yuridis Danantara menghadirkan inovasi dalam tata kelola kekayaan negara dengan menekankan transparansi, digitalisasi, dan efisiensi dalam pengelolaan aset publik. Dari perspektif hukum, penerapan model ini harus selaras dengan berbagai regulasi yang telah ada, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memastikan bahwa tata kelola kekayaan negara tetap dalam koridor hukum yang jelas. Selain itu, aspek pengawasan dan akuntabilitas dalam model Danantara harus mengacu pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN serta UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan guna mencegah penyalahgunaan wewenang. Mengingat tantangan hukum dan teknologi dalam implementasi sistem digital ini, diperlukan revisi atau harmonisasi regulasi yang lebih adaptif, termasuk kemungkinan penerbitan peraturan baru yang secara khusus mengatur tata kelola aset negara berbasis digital. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, model Danantara dapat menjadi instrumen yang tidak hanya meningkatkan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, tetapi juga memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Untuk mengimplementasikan Danantara, langkah awal yang perlu dilakukan adalah membuat regulasi khusus yang mendukung digitalisasi tata kelola aset negara. Selanjutnya, penguatan infrastruktur digital dan sistem pengawasan berbasis teknologi diperlukan agar pengelolaan aset lebih transparan. Terakhir, pelatihan SDM diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi model ini.

References

- Abdullah, M. (2021). *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Petugas Pencarian Dan Pertolongan (Rescuer) Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- adar BakhshBaloch, Q. (2017). *Government efforts and roadmaps for building information modeling implementation: lessons from Singapore, the UK, and the US* 3. 11(1), 92–105.
- Algan Tezel. (2021). *Insights into Blockchain Implementation in Construction: Models for Supply Chain Management*.

- Atsar, A. (2023). Implikasi Pembaharuan Hukum Paten Yang Berdasarkan Negara Hukum Pancasila Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 23–32. <https://doi.org/10.35586/jyur.v10i2.3267>
- Azamta Besnata Mutiara, & Arief Suryono. (2024). Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Nota Kesepahaman Dalam Pranata Hukum Kontrak Di Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(2), 95–106. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.141>
- Cioffi, J. W. (2019). Governing Globalization? The State, Law, and Structural Change in Corporate Governance. *Journal of Law and Society*, 27(4), 572. <https://doi.org/10.1111/1467-6478.00168>
- Cooke, B., & Williams, P. (2025). *Construction planning, programming and control*. John Wiley & Sons.
- Darmawati, A. (2020). Pengelolaan Bumn Sebagai Transformasi Keuangan Publik Menjadi Keuangan Privat Dalam Persepektif Hukum Keuangan Negara. *Yustitia*, 6(2), 119–134. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v6i2.121>
- Dwiputrianti, S., & Zandrato, A. (2016). Pengelolaan Aset Peralatan Berat di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13(2), 247–268.
- Hamdi, K. (2023). *Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Negara dalam Islam dan Relevansinya dengan Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*.
- Hamledari, H., & Fischer, M. (2021). The application of blockchain-based crypto assets for integrating the physical and financial supply chains in the construction & engineering industry. *Automation in Construction*, 127(December). <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2021.103711>
- Isti Puspitasari, & Irwan Triadi. (2024). Tinjauan Yuridis Pembaharuan RUU KUHP Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dikaitkan Dengan Undang-Undang Lintas Sektoral. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(3), 64–91. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.262>
- Jamilah, L., & Firmansyah, A. (2023). Preliminary Concept of Alternative Agrarian Reform for Justice: The Social Tenure Domain Model (STDM) Approach to Constructing a Just Society in Indonesia. *Jurnal Hukum*, 39(2), 174–191.

- Koeswahyono, I. (2024). *A MODEL OF STATE-OWNED ASSET MANAGEMENT BASED ON PANCASILA VALUES : ACHIEVING THE HIGHEST AND BEST USE*. 17(3), 465–489.
- Ma, M., Tam, V. W. Y., Le, K. N., Butera, A., Li, W., & Wang, X. (2023). Comparative Analysis on International Construction and Demolition Waste Management Policies and Laws for Policy Makers in China. *Journal of Civil Engineering and Management*, 29(2), 107–130. <https://doi.org/10.3846/jcem.2023.16581>
- Mas'ud, M. F. (2022). Pemikiran Hukum Ekonomi Islam Muslim Kontemporer (Elaborasi Nalar Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer Umer Chapra dan Timur Kuran). *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(Mei), 152–165.
- Oti-Sarpong, K., Pärn, E. A., Burgess, G., & Zaki, M. (2021). *Transforming The Construction Sector : An Institutional Complexity Perspective*.
- Pemerintah, konsep tual. (2003). *DHendianto-BiroHukum BPK-RI/5/26/2008 1. 1*, 1–40.
- Picard, M. (2020). *Kebalian: Konstruksi Dialogis Identitas Bali*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Portuna, C. D. (2024). Perbandingan Hukum Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law dan Common Law: Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Amerika. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 369. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11768415>
- Pratama, F. K., & Santoso, B. (2022). Kajian Yuridis Kerjasama Pemerintah Dan Swasta Model BOT (Build Operate Transfer) Sektor Infrastruktur Jalan Di Indonesia. *Notarius*, 15(2), 686–705. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36033>
- Sugita, I. M. (2024). *INJAUAN YURIDIS KONSEP NEGARA HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA*. 7(November), 105–119.
- Sujoko, A. (2020). Konsep dan Praktek Ruang Lingkup Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. *Administrative Law & Governance Journal*, 3(3), 442–463. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9646>
- Togatorop, A. M. H., Darmawan, D. W., & Hidayati, R. (2024). Transformasi Digital dalam Mencapai Keberlanjutan di Bidang Ekonomi dan Keuangan. *Prosiding Management Business Innovation Conference (MBIC)*, 7(1), 16–31. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/MBIC/index%0AMagister>
- Umam, K. (2021). Implikasi Yuridis Transformasi Unit Syariah Perusahaan

- Asuransi/Reasuransi Ke Dalam Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah. *Veritas et Justitia*, 7(2), 380–405. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4336>
- Umar, T. (2022). The Impact of COVID-19 on the GCC Construction Industry. *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 13(2), 1–17. <https://doi.org/10.4018/IJSSMET.20220301.0a1>
- Viljoen, S. (2021). A RELATIONAL THEORY OF DATA GOVERNANCE. *European University Institute*, 131(2), 2–5. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT%0Ahttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0011:pt:NOT>
- Zhang, B., Wang, Y., & Sun, C. (2023). Urban environmental legislation and corporate environmental performance: End governance or process control? *Energy Economics*, 118, 106494.